

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan internasional pada awalnya hanya membahas masalah perang, Keamanan dan solusi untuk mencapai kedamaian kini telah bergeser. Pertumbuhan penduduk serta banyak kemajuan industri maupun teknologi makin berkembang. Keberadaan teknologi canggih memudahkan orang untuk melakukan aktivitas, dan semuanya tampak cepat dan efisien. Terlihat sangat mendukung kehidupan manusia namun berdampak sebaliknya terhadap lingkungan sekitarnya. Permasalahan hutan sudah menjadi persoalan dari tahun ke tahun bagi Indonesia. Kini ancaman yang sebenarnya akan dihadapi adalah ancaman lingkungan.

Dunia internasional sudah mulai sering membicarakan isu lingkungan setelah perang dingin. Negara-negara akhirnya sadar akan pentingnya permasalahan lingkungan, meningkatnya kesadaran negara akan lingkungan akibat adanya penurunan kualitas hidup yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan salah satunya adalah meningkatnya suhu bumi serta berlubangnya lapisan ozon yang menyebabkan meningkatnya berbagai macam penyakit menular serta bencana alam. Melihat dari hal tersebut maka dari itu isu lingkungan menjadi agenda yang dibahas dalam dunia internasional (Sayyidati 2017, 39-40).

Urgensi dalam penelitian ini adalah besarnya dampak yang diakibatkan dari deforestasi yang terjadi terhadap masyarakat internasional. Dampak dari deforestasi

yang terjadi adalah penurunan kualitas atmosfer bumi. Deforestasi juga mengakibatkan peningkatan terhadap gas rumah kaca sehingga menyebabkan naiknya suhu udara global, beberapa dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global adalah krisis air, kabut asap serta kebakaran hutan, menyebarnya berbagai macam wabah penyakit serta naiknya permukaan air laut. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas hidup manusia.

Pentingnya isu lingkungan dalam hubungan internasional maka mendorong terciptanya organisasi internasional yang fokus terhadap isu lingkungan, salah satunya adalah *Greenpeace*. Pada tahun 2000 *Greenpeace* secara resmi memasuki wilayah Asia Tenggara salah satunya adalah Indonesia. *Greenpeace* melihat wilayah Indonesia yang memiliki keberagaman hayati dan hewan hal tersebut menjadi alasan bagi *Greenpeace*. Terlebih Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dengan berbagai isunya salah satunya adalah deforestasi (Fadhlurrahman 2021, 4).

Greenpeace merupakan salah *INGO* yang berfokus terhadap masalah lingkungan. *INGO* sendiri memiliki kebebasan otonom dan independent untuk pendanaan *INGO* sendiri mendapatkannya dari donasi beberapa personal yang mereka dapatkan. Mereka juga dapat memutuskan suatu kebijakan tanpa terikat terhadap elit politik atau partai tertentu. Jika melihat dari segi jenis *NGO*, *Greenpeace* merupakan *Nothern NGO* yang berfokus terhadap masalah lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya konsumerisme karena adanya pasar bebas. Sedangkan *Greenpeace* merupakan organisasi yang beroperasi di 41 negara didunia. Dalam *Greenpeace* sendiri memiliki beberapa keanggotaan seperti

Organisasi Nasional, Organisasi Regional, Organisasi Kandidat (Fadhlurrahman 2021, 36-37).

Berdasarkan salah satu nilai dasar yang diterapkan oleh *Greenpeace* yaitu *independence*, *Greenpeace* tidak bergantung terhadap dana dari pemerintah, ataupun korporasi manapun. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kebebasan *Greenpeace* sendiri dalam mengambil keputusan. Donasi dari individu merupakan tulang punggung *Greenpeace*, maka dari itu *Greenpeace* selalu menerapkan transparansi terhadap pengelolaan dana tersebut dan selalu dilaporkan dalam websitenya dalam laporan tersebut memuat tentang laporan auditor tahunan (Greenpeaceid 2023).

Tujuan utama *Greenpeace* adalah menjaga bumi agar tetap hijau sehingga mampu menopang kehidupan kita dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Untuk mencapai hal tersebut *Greenpeace* melakukan kampanye dan aksi dalam memberantas kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Di Indonesia *Greenpeace* fokus terhadap kelestarian hutan, karena Indonesia kaya akan keanekaragaman makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Hutan juga membantu bumi dalam menjaga dan melindungi kita dari peningkatan iklim global.

Organisasi *Greenpeace* juga menarik untuk diteliti karena aksinya baik dalam bentuk kampanye maupun aksi lainnya dianggap berani dan lebih frontal dari pada organisasi lainnya. *Greenpeace* selalu menuntut transparansi data dan informasi dari pemerintah. Postingan *Greenpeace* juga bersifat persuasif serta karena itu media *Greenpeace* mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi massa, sehingga

mampu mempengaruhi dan mendesak pemerintah dalam menerapkan kebijakan terkait lingkungan.

Di Indonesia *Greenpeace* fokus terhadap isu lingkungan terkait hutan karena Indonesia merupakan wilayah yang banyak memiliki hutan dan menjadi penyumbang oksigen sebagai penunjang kehidupan manusia didunia, salah satunya adalah hutan Papua yang merupakan wilayah hutan yang cukup luas di kawasan Asia. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan daerah pemilik hutan yang cukup banyak di Indonesia. Namun kegiatan industri sawit membuat hutan Papua mengalami deforestasi.

Secara sederhana definisi deforastasi merupakan perubahan pada hutan dalam bentuk pengurangan pohon pada permukaan hutan yang awalnya bervegetasi pohon yang rapat dalam suatu luas tertentu pada hutan menjadi bukan hutan yang mana dimaksud bukan bagian dari vegetasi pohon atau tumbuhan hutan. (Lindungihutan.com 2021). Jika melihat keadaan riil hutan di Pulau Papua, yang pertama adalah Provinsi Papua yang memiliki ciri khas yaitu memiliki Pegunungan Tengah yang membatasi kedua provinsi di Pulau Papua, dan secara topografis Provinsi Papua memiliki dataran rendah berawa serta dataran tinggi pegunungan lengkap dengan padang rumput berisi alang-alang. Melihat dari hal tersebut Pulau Papua memiliki keberagaman lanskap. Dibandingkan dengan hutan di Kalimantan ataupun di Sumatra hutan Papua lebih padat, jika melihat secara langsung permukiman warga berdampingan dengan pepohonan dan hutan.

Hal ini dikarenakan hutan Kalimantan dan Sumatra sudah banyak mengalami kerusakan akibat ekspansi lahan kebun kelapa sawit khususnya Provinsi Riau menduduki peringkat pertama konsensi sawit terbanyak yaitu 9.513.208, hal ini berdasarkan rincian produksi sawit tahun 2019. Karena sudah banyak hutan dipulau Kalimantan dan Sumatra yang sudah tercemar oleh industri sawit, keadaan hutan Papua yang belum terlalu disentuh oleh industri sawit menarik perhatian investor untuk melakukan operasi industri sawit disana (Kompas.com 2022).

Semakin berkurangnya hutan di Indonesia maka dari itu hutan Papua menjadi harapan terakhir. Ekspansi lahan atau perluasan lahan adalah tindakan perluasan wilayah industri, dalam kegiatan perusahaan sawit ekspansi lahan dilakukan untuk memperluas wilayah perkebunan sawit demi meningkatkan produksi kelapa sawit, jika hal tersebut terus terjadi maka bisa jadi hutan Papua akan seperti hutan Kalimantan dan Sumatra. Terlebih mengingat hutan Papua merupakan hutan lindung terbesar yang dimiliki oleh Indonesia, namun dengan masuknya industri sawit mengakibatkan hutan Papua mengalami deforestasi.

Gambar 1.1. Citra Satelit Deforestasi Papua



Sumber: CNN Indonesia

Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) menerbitkan citra satelit yang memperlihatkan deforestasi di Papua, menunjukkan bahwa hutan Pulau Papua sudah banyak berubah akibat deforestasi selama dua dekade terakhir. Seperti yang diungkapkan oleh David Gaveau berdasarkan peta Pulau Papua pada tahun 2019 yang merupakan yang merupakan peneliti dari NASA, sebanyak 28% hutan Papua hilang karena industri sawit, 23% untuk sistem pertanian ladang berpindah, 16% karena tebang pilih, 2% untuk pertambangan, 5% karena kebakaran, dan 11% untuk perluasan sungai dan danau (CNN Indonesia 2021).

Jika melihat data pada tahun 2018 Pulau Papua memiliki tutupan hutan 33.847.928 yang mana Provinsi Papua memiliki 24.993.957 hektar serta Provinsi Papua Barat memiliki tutupan hutan sebanyak 8.853.971 hektar (KLHK, 2020). Jika dibandingkan dengan data yang diungkapkan *Greenpeace* pada tahun 2021 hutan Papua masih memiliki tutupan hutan sebanyak 36,9 juta hektar namun lahan dari hutan yang dialokasikan pada izin sawit terdapat 16 juta hektar yang tersebar di berbagai provinsi di Pulau Papua (Greenpeaceid 2021). Jika melihat perbandingan dari data tersebut memang terjadi penurunan deforestasi dari tahun 2018 hingga 2021.

Namun melihat dari data 2021 tersebut hutan Papua masih banyak terkontaminasi terhadap deforestasi akibat industri sawit, hampir dari setengahnya tercemar industri sawit terlebih peningkatan serta penurunan deforestasi tersebut tidak dapat diprediksi kedepannya. Hal tersebut seharusnya perlu diperhatikan agar kerusakan hutan yang dialami Papua tidak seperti hutan Kalimantan dan Sumatra.

Berangkat dari munculnya deklarasi provinsi Papua dan Papua Barat yang berkomitmen untuk mempertahankan tutupan hutan minimal 70%. Merupakan semangat baru untuk menjaga hutan di Pulau Papua agar tetap mempertahankan tutupan hutan (Greenpeaceid 2021).

Berdasarkan sosial media serta *website* resmi *Greenpeace* terdapat beberapa masalah yang menjadi alasan bagi *Greenpeace* dalam mengatasi deforestasi akibat perusahaan sawit di Papua. Pada tahun 2018 tepatnya 18 Februari, masyarakat adat melaporkan serta menuntut PT PNM (Permata Nusa Mandiri) yang terletak di Lembah Grime Nawa kepada bupati Jayapura yang telah merampas lahan milik hutan masyarakat adat yang mana telah melakukan pembukaan lahan di luar konsensi mereka. Pada tahun 2019 saja PT PNM yang dimiliki oleh Anthoni Salim atau Salim Group melakukan pembukaan lahan dan berkontribusi dalam deforestasi di Pulau Papua sebanyak 310 hektare.

Sedangkan luas kawasan hutan yang dilepas untuk kebun sawit sekitar 16.000 hektare terhitung sejak PT PNM beroperasi. PT PNM melakukan ekspansi lahan dengan cara menebang pohon sehingga merusak hutan dan menghilangkan satwa alami yang ada disana, penebangan ini dilakukan di kawasan hutan adat sekitar serta salah satu jalan untuk memantau satwa identik Papua yaitu cendrawasih. *Greenpeace* menganggap pengelolaan lahan akan lebih berdampak baik bagi lingkungan jika dipegang oleh masyarakat adat ketimbang dipegang oleh perusahaan.

Didukung dengan ditutupnya data HGU (Hak Guna Usaha) akan lebih mempersulit dalam mengungkapkan kerusakan hutan akibat perusahaan sawit di Papua. HGU merupakan hak untuk dapat mengusahakan atau mengoperasikan lahan milik negara demi mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sejak tahun 2018 hingga 2019 dilakukannya penuntutan atas transparansi data HGU, namun hasil putusannya hanya dibuka sebagian saja sehingga *Greenpeace* tidak mempunyai ruang yang leluasa demi mengungkap kejahatan atas kerusakan hutan di Pulau Papua (Greenpeaceid 2019).

Tertutupnya informasi di HGU maka akan mempermudah tindakan korupsi. Hubungan tindakan korupsi dengan kerusakan lingkungan sangat erat, beberapa tindakan elit politik yang bersekongkol dengan perusahaan serta menerima suap dari perusahaan sawit akan sangat merusak hutan di Papua, sehingga deforestasi akan terus terjadi. Praktik korupsi akan berhenti salah satunya dengan dibuka data HGU. Melalui hal tersebut akan terungkap data terkait kepada siapa saja hutan Papua diberikan serta kepemilikan lahan.

Pada tahun 2020 tercatat setidaknya 75 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Papua dan 18 perusahaan di Papua Barat. Berikut merupakan 10 nama-nama perusahaan sawit terbesar adalah PT Bio Inti Agrindo, PT Henrison Inti Persada, PT Tunas Sawaerma, PT Pusaka Agro Lestari, PT Berkat Cipta Abadi, PT Dongin Prabhawa, PT Papua Agro Lestari, PT Tandan Sawita Papua, PT Nabire Baru (Greenpeaceid 2020).

Ditemukannya pelanggaran oleh PT Korindo merupakan salah satu praktik pelanggaran peraturan tentang izin usaha yang telah ditetapkan pemerintah pasalnya PT Korindo diduga melakukan perluasan wilayah dengan cara pembakaran lahan. Hal tersebut memicu kebakaran hutan yang meluas. Dampak dari kebakaran hutan akan menyebabkan deforestasi lebih dari konsensi lahan milik PT Korindo, termasuk hutan lindung serta hutan adat (BBC NEWS, 2020).

PT Korindo merupakan perusahaan asing milik Korea Utara yang dimiliki oleh Seung Eun Ho. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan yaitu PT Dongin Prabhawa, PT Berkat Cipta Abadi, PT Tunas Sawa Erma, PT Papua Argo Lestari. Anak perusahaan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Pulau Papua baik Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua. Berdasarkan investigasi *Greenpeace* dan Forensic Architecture perusahaan ini membuka lahan dengan cara dibakar dan menghabiskan seluas hampir kota Seoul.

Perusahaan-perusahaan sawit juga melakukan penipuan dalam bentuk modus terhadap masyarakat adat dalam kegiatan ekspansi perkebunan sawit di Tanah masyarakat Papua. Hal ini berdasarkan penelitian *Greenpeace* yang dilakukan pada 3 titik wilayah, yaitu Komunitas suku Yeinan, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke Papua; wilayah perizinan PT. Central Cipta Murdaya Group, daerah suku Auyu, Kecamatan Jair, Kabupaten Boven Digoel Papua di konsensi perizinan PT. Megakarya Jaya Raya Pacific Interlink/Hayel Saed Anam [ex-Menara Group] serta daerah Suku Mpur, di kampung Arumi, Kecamatan Kebar Timur, Kabupaten Tambrau Papua Barat konsensi perizinan Salim Group. Setidaknya ada beberapa modus yang dilakukan oleh perusahaan sawit terhadap masyarakat adat untuk

melakukan ekspansi yaitu yang pertama *state capture corruption*, yaitu merupakan modus korupsi dengan oknum yang berkuasa dalam pemerintahan yang akhirnya dapat mempermudah perusahaan sawit mendapatkan perizinan.

Kedua, memanipulasi atas nama dalam kehadiran kesepakatan masyarakat adat yang mana pada dasarnya hanyalah merupakan oknum pilihan dari perusahaan tanpa memperhatikan keberagaman suara masyarakat adat lainnya. Ketiga, tekanan yang berujung kekerasan, dalam operasinya perusahaan selalu melibatkan pihak TNI/Polisi. Keempat, Obral janji terhadap masyarakat seperti uang, atau jabatan tertentu sehingga masyarakat adat mau menyerahkan tanah adat mereka (Greenpeaceid, 2020)

Akibat masuknya ekspansi perusahaan sawit merusak hutan dan ekosistem di hutan Papua. Hal ini dapat dilihatnya dari hilangnya kebun sagu milik masyarakat hingga tercemarnya aliran sungai di wilayah ekspansi perkebunan sawit. Tidak hanya itu perluasan kebun sawit juga mengakibatkan hilangnya ekosistem yang ada di hutan Papua. Contohnya saja di Lembah Kebar Suku Mpur sudah mulai merasakan hilangnya Burung Wesia dan Rumpit Kembar yang mana dulu sebelum masuknya sawit sering dijumpai. Hal tersebut sangat disayangkan jika dua spesies endemic di Lembah Kebar hilang (Greenpeaceid 2020).

Beberapa program yang dijalankan oleh *Greenpeace* dalam upayanya mengatasi deforestasi adalah peta kepo hutan, Tim Cegah Api, penelitian dan pendekatan terhadap masyarakat dan kampanye yang bertajuk “Saya Bersama Hutan Papua”. Peta Kepo Hutan memungkinkan publik untuk mengakses peta

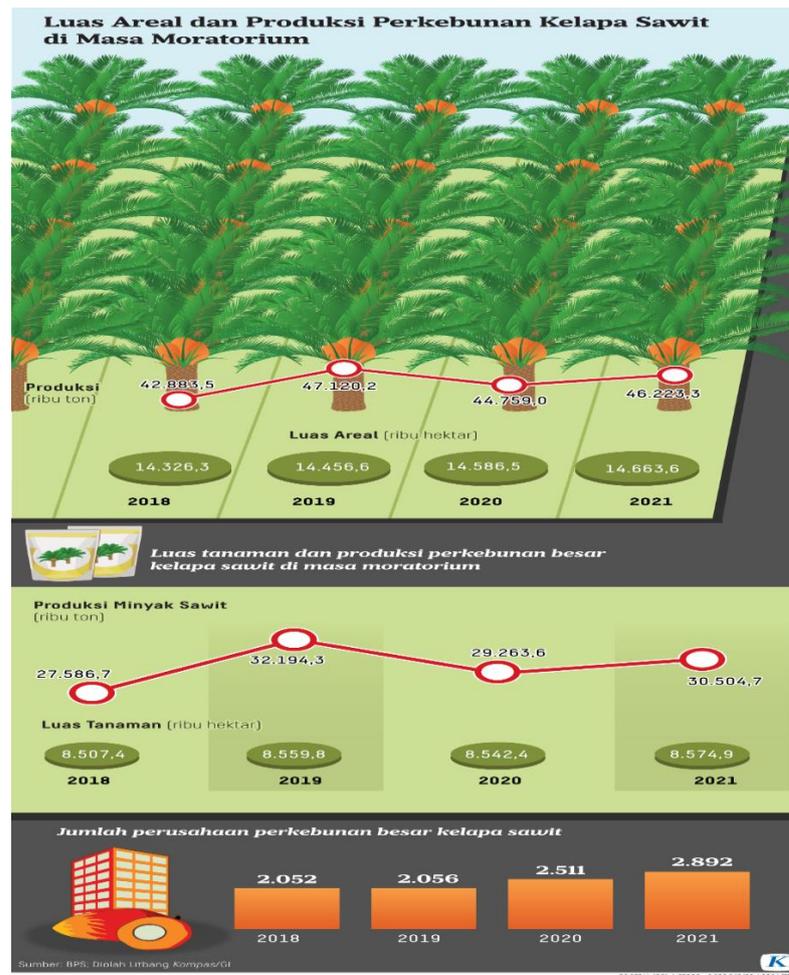
deforestasi, kebakaran hutan, serta konsensi perusahaan serta dalam bentuk kampanye seperti melakukan postingan-postingan terkait isu deforestasi di Papua dan juga mengadakan beberapa petisi. *Greenpeace* juga melakukan penggalangan dana serta monitoring terhadap implementasi kebijakan pemerintah beserta perusahaan sawit di Papua, selain itu *Greenpeace* juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat adat dan melakukan litigasi terhadap tertutupnya data HGU. Namun sampai saat ini belum ada informasi terkait operasi Tim Cegah Api di Papua karena dataran di Papua cukup bervariasi dan membuat lebih sulit untuk ditempuh.

Alasan penulis dalam pengambilan jangka tahun 2018 hingga 2021 adalah karena pada tahun tersebut diberlakukannya moratorium sawit, yaitu pemberhentian pemberian izin terhadap perusahaan sawit untuk melakukan perluasan kebun sawit mereka dengan beberapa ketentuan. Moratorium berfungsi untuk mencegah peningkatan produksi emisi gas karbon, deforestasi serta kebakaran hutan. Selama moratorium berlaku pemerintah wajib untuk menanta ulang kebijakan yang dikeluarkannya terkait perkebunan sawit, terutama perkebunan sawit yang dikawasan hutan (Kompas.com, 2022).

Namun moratorium sawit ini hanya berlaku pada tahun 2018 hingga 2021 dan pada nyatanya masih banyak ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan sawit serta masih terdapat deforestasi diberbagai wilayah Indonesia. Banyak hal yang menjadi faktor dari tidak berjalan dengan sesuai tujuan dari moratorium sawit ini mulai dari teknis pengadaan intensifikasi untuk meningkatkan produksi kebun kelapa sawit yang lambat, isu lingkungan, agraria hingga pemburuan. Meskipun sudah

diberlakukan moratorium sawit masih saja ada beberapa perusahaan yang nakal tetap melakukan ekspansi (Kompas.com, 2022).

Gambar 1.2. Produksi Perkebunan Kelapa Sawit



Sumber: Kompas.com (2022)

Namun jika melihat terhadap pada sisi Papua jangka waktu diberlakukannya moratorium sawit deforestasi yang terjadi malah menurun, meskipun begitu masih terdapat beberapa perusahaan sawit yang tidak mengikuti peraturan terkait moratorium sawit, serta masih melakukan ekspansi di kawasan hutan primer yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan prespektif konstruktivisme bahwa

aktor internasional dapat mengkonstruksikan realitas dan mempengaruhi pemikiran dan tindakan aktor lainnya. Moratorium sawit merupakan salah satu kebijakan sementara yang dapat dilanjutkan atau tidak, sehingga melalui kebijakan ini dapat melihat bagaimana *Greenpeace* dapat mempengaruhi pemangku kebijakan dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas maka dari itu penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian “Upaya *Greenpeace* Dalam Mengatasi Deforestasi Akibat Ekspansi Lahan Perusahaan Sawit di Papua Tahun 2018-2021”. Sesuai masalah yang teliti dan data yang didapat serta berdasarkan observasi terhadap *website* dan Instagram resmi *Greenpeace* lebih banyak melakukan upaya dalam mengatasi deforestasi di Papua akibat ekspansi kebun sawit pada tahun 2018-2021. Selain itu alasan penulis memilih penelitian dengan periode 2018-2021 karena pada tahun tersebut paling banyak data terkait deforestasi akibat perkebunan sawit di Papua serta upaya-upaya *Greenpeace* dalam mengatasinya yang diperoleh penulis sehingga dapat menunjang penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Poin-poin berikut merupakan identifikasi sebagai permasalahan dalam upaya *Greenpeace* dalam mengatasi deforestasi akibat ekspansi lahan perusahaan sawit di Papua tahun 2018-2021.

1. Perkebunan sawit menjadi penyumbang terbesar deforestasi di Papua.
2. Deforestasi yang menyebabkan kerusakan hutan di Papua menjadi salah satu penyebab meningkatnya pemanasan global.

3. Tertutupnya data pemerintahan terkait pengelolaan hutan dan deforestasi di Pulau Papua hutan menjadi tantangan *Greenpeace* dalam mengatasi deforestasi di Papua akibat pembangunan kebun sawit.
4. Terdapat perusahaan sawit yang melakukan modus penipuan agar dapat melakukan operasi perluasan lahan.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi objek penelitian yang penulis lakukan. Fokus penelitian dalam tulisan ini mencangkup data-data yang relevan dan tidak. Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya *Greenpeace* dalam mengatasi deforestasi akibat ekspansi lahan perusahaan sawit di Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun Batasan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2018 sampai tahun 2021.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah mempertanyakan “Bagaimana upaya *Greenpeace* mengatasi deforestasi akibat ekspansi lahan perusahaan sawit di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2018-2021?”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya Organisasi Internasional yaitu *Greenpeace* dalam menangani deforestasi yang diakibatkan oleh ekspansi lahan perusahaan sawit di Papua tahun 2018-2021.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca tentang pentingnya isu lingkungan. Terlebih pada isu kerusakan hutan yang akan berdampak pada peningkatan suhu bumi, sehingga menimbulkan berbagai bencana alam lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan studi Hubungan Internasional. Sehingga penelitian penulis dapat bermanfaat sebagai bahan kajian serta sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, baik dalam ranah Ilmu Studi Hubungan Internasional maupun dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

1.6.2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk menerapkan ilmu yang didapat terhadap lingkungan dan alam agar tetap terjaga. Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang berharga serta menunjang kehidupan kita sebagai manusia maka dari itu perlu dijaga dan dilestarikan. Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait kelestarian hutan dan kinerja perusahaan di Indonesia. Penulis juga ingin menunjukkan bahwa keberadaan organisasi internasional seperti *Greenpeace* memberikan dampak yang sangat berpengaruh dalam kelestarian hutan di Indonesia secara khususnya di Papua.